

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abu Ahmadi. 2007. *Sosiologi Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Achmad Ali. 2002. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: Penerbit Toko Gunung Agung.
- Agussalim Andi Gadjong. 2007. *Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Ana Nadia Abrar. 2005. *Terampil Menulis Proposal Penelitian Komunikasi*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Bagir Manan. 2001. *Menyongong Fajar Otonomi Daerah*. Bandung: Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII.
- , 1992. *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*. Jakarta: Ind-Hill-Co.
- Bahder Johan Nasution. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Dasril Radjab. 2005. *Hukum Tata Negara Indonesia*, cet. Ke 2. Jakarta: Rineka Cipta.
- Dominikus Rato. 2010. *Filsafat Hukum, Mencari, Menemukan, Dan Memahami Hukum*. Surabaya: LaksBang Yustisia.
- Engkoswara dan Aan Komariah. 2012. *Administrasi Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Kesit Bambang Prakosa. 2005. *Pajak dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta: UII Press.
- Leden Marpaung. 2009. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan, Bagian Pertama)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Maria Farida Indrati Soeprapto. 2006. *Ilmu Perundang-Undangan, Dasar-Dasar dan Pembentukannya*. Yogyakarta: Kanisius.

- Mardjono Reksodiputro. 1994. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batos Toleransi*. Jakarta: Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum.
- Moh Mahfud MD. 2010. *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia (Edisi Revisi)*. Jakarta: Reneka Cipta.
- Muljono Djoko. 2010. *Panduan Brevet Pajak*. Yogyakarta: Andi.
- Muladi. 1997. *Hak Asasi Manusia Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Munir Fuady. 2010. *Dinamika Teori Hukum*. Ciawi-Bogor: Ghalia Indonesia.
- Ni'matul Huda. 2012. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Bandung: Nusa Media.
- Patrialis Akbar. 2013. *Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Philippus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya oleh Pegadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Pudyatmoko, *Pengantar Hukum Pajak Edisi IV*, Andi, Yogyakarta, 2007
- Rahardjo Adisasmita. 2011. *Manajemen Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Riduan Syahrani. 1999. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti.
- Romli Atmasasmita. 1996. *Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: Binacipta.
- Rosjidi Ranggawidjaja. 1998. *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini. 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suandy. 2008. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.

Sudarto. 2002. *Hukum Pidana I*. Cetakan Ke-2. Semarang: Yayasan Sudarto.

-----, 2002. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumi.

Sudarwan Danim. 2002. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia.

B. Jurnal

A. Zakarsi, “Pengawasan Terhadap Peraturan Daerah”, *Jurnal Ilmu Hukum* Jilid 2 Terbitan 1, Universitas Jambi, Jambi, 2011.

Aju Putrijanti, Lapon T. Leonard, and Kartika Widya Utama, “Peran PTUN Dan AUPB Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)”, *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 30.2 (2018).

Deden Sumantry, “Reformasi Perpajakan sebagai Perlindungan Hukum yang Seimbang Antara Wajib Pajak dengan Fiscus Sebagai Pelaksanaan Terhadap Undang-Undang Perpajakan”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 8 No. 1 April 2011, Jakarta: Kemenkumham RI, 2011.

Edy Kastro, “Hubungan Kausalitas Antara Politik dan Hukum”, *Jurnal Hukum*, Vol. VII. No. 1, Edisi Januari 2009, Palembang: PPS Universitas Sriwijaya, 2009.

Fatkhurohman, “Implikasi Pembatalan Perda Terhadap Ketepatan Proporsi Teori Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan di Indonesia”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.13 No. 1 Januari 2013, Purwokerto: Fakultas Hukum Unsoed, 2013.

Fuad Bawazier, “Reformasi Pajak di Indonesia”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 8 No. 1 April 2011, Jakarta: Kemenkumham RI, 2011.

Jazim Hamidi, “Paradigma Baru Pembentukan dan Analisis Peraturan Daerah (Studi Atas Perda Peloyanan Publik dan Perda Keterbukaan Informasi Publik)”, *Jurnal Hukum*, Vol. 18, No. 3, Juli 2011, Malang: Fakultas Hukum Unibraw, 2011.

Ichsan Syuhudi, “Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum Implementasi AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik”, 17.1 (2017).

Kadar Pamuji, “Implikasi Kebijakan Pendaerahan Pengelolaan PBB Setelah Berlakunya UU No. 28 Tahun 2009 Tentang PDRD”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11, No. 1, Januari 2011, Purwokerto: Fakultas Hukum Unsoed, 2011.

- Krishna D. Durumurti, “Hukum Pajak atau Hukum dan Pajak, Refleksi Hukum”, *Jurnal Ilmu*, Edisi Oktober 2010, Salatiga: Fakultas Hukum UKSW, 2010.
- Madjid, Olvi dan Lintje Kalangi, “Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung,” *Jurnal EMBA 478* Vol. 3, no. 4 (2015).
- Nelati Asril, “Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap Tingkat Penerimaan Tunggal Pajak” (Tesis, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makasar, 2014).
- RA. Agus Abikusna, “Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah”, *Jurnal SOSFILKOM*, Volume XIII Nomor 01 Januari-Juni 2019, FISIP UMC, 2019.
- Rima Lestari dkk, “Legalitas Kejaksaaan Dalam Menyelesaikan Tunggal Pajak Daerah Untuk Peningkatan Pendapatan Daerah (studi di Kabupaten Bandung Barat dan Kota Bekasi)”, *Jurnal Mahkamah*, Vol. 5, No.1, Juni 2020. Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 2020.
- Siswo Yudo Husodo, *Mimpi Negara Kesejahteraan*, Cetakan I, juli/2006.
- Sukanto Satoto dan Bahder Johan Nasution, “Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara Untuk Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik”, LPPM Universitas Jambi, *Jurnal Sains Sosio Huaniora* P-ISSN: 2580-1244 Volume 3 Nomor 1 Juni 2019.

C. Kamus

- Sudarsono. 1992. *Kamus Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Tim Penyusun. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ke-Empat*. Depdiknas. Jakarta.

A. Artikel Internet

- Pemerintah Daerah Kota Cimahi, Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi, “Kerja Sama Penagihan Pajak Daerah Dengan Kejaksaaan Negeri Cimahi”, diakses melalui <https://Bappenda.Cimahikota.GO.ID/Berita-Kerja-Sama-Penagihan-Pajak-Daerah-Dengan-Kejaksaaan-Negeri-Cimahi.HTML>, Tanggal Akses 24 Desember 2024.

E. Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

_____, *Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia*. UU Nomor 11 Tahun 2021. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6755.

_____, *Undang-Undang tentang Kejaksaan Republik Indonesia*. UU Nomor 16 Tahun 2004. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401.

_____, *Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. UU Nomor 1 Tahun 2022. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757.

_____, *Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah*. UU Nomor 23 Tahun 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587.

_____, *Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang*. UU Nomor 7 Tahun 2021. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736.

_____, *Undang-Undang tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa*. UU Nomor 19 Tahun 1997. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 368.

_____, *Peraturan Presiden tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia*. PERPRES Nomor 38 Tahun 2010.

_____, *Peraturan Jaksa Agung Nomor 040/AJ/A/12/2010 tanggal 13 Desember 2010 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Wewenang Perdata dan Tata Usaha*

- _____, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 207/PMK.07/2018 Tentang Pedoman Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah
- _____, Himpunan Petunjuk Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (JAMDATUN), XXII, Penerbit: Kejaksaan Agung Republik Indonesia.